

**KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN DAN PENGAWASAN
PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DI PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH *JUNCTO*
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

ABSTRAK

Menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, isu mengenai kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan harus segera mendapat perhatian. Pemerintah Daerah harus memiliki kemandirian dan inisiatif bagi kemampuan pembangunan daerahnya. Salah satu sumber alternatif pembiayaan yang dapat ditempuh oleh Pemerintahan Daerah adalah mengenai penerbitan obligasi daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Namun pengajuan penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah banyak sekali hambatan yang terjadi di lapangan dalam hal persyaratan administratif salah satunya yaitu ketidakpastian hukum antara peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini ialah mengenai kewenangan dan pengawasan penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penerbitan Obligasi Daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pengawasan Penerbitan Obligasi Daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. sifatnya deskriptif analisis yaitu menjelaskan suatu segala peristiwa yang sedang diteliti dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis normatif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penulisan ini adalah bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah dan pada prinsipnya Pemerintahan Daerah dimungkinkan menerbitkan obligasi dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan melalui sektor pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat perlu langkah strategis agar Penerbitan Obligasi Daerah dapat direalisasikan dan perlu membuat kebijakan yang mendukung teralisasinya Penerbitan Obligasi Daerah.

Kata Kunci: Obligasi Daerah, Kewenangan, Pemerintahan Daerah.

**LEGAL CERTAINTY OF AUTHORITY AND SUPERVISION ON
MUNICIPAL BONDS ISSUE IN WEST JAVA REGIONAL
GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION BASED ON LAW
GOVERNMENT TOWARD LAW NUMBER 23 YEAR 2014
REGARDING REGIONAL GOVERNMENT JUNCTO NUMBER 33
YEAR 2004 REGARDING FISCAL BALANCE BETWEEN CENTRAL
GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENT**

ABSTRACT

In the era of free trade globalization, the issue of regional autonomy in managing development must be addressed. Regional Government should have the independence and initiative for regional development capabilities. One alternative source of financing that can be taken by the Regional Government is the issuance of municipal bonds intended to finance infrastructure development in the region. However, the submission of the Municipal Bond issuance by regional governments a lot of obstacles that occur in the field in terms of administrative requirements, one of which is the legal uncertainty between the rules made by the Central Government in this case is the authority and supervision of the issuance of Municipal Bonds. Based on this, the problem in this research is the authority of the regional government in Issuance of Municipal Bonds after the adoption of the Law Number 23 Year 2014 Regarding Regional Governance and Oversight Issuance of Municipal Bonds after the adoption of the Law Number 23 Year 2014 Regarding Regional Government, particularly in Government West Java Province.

The research is using, method normative. its descriptive analysis of the data used are secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Data collection techniques used is a literature study. Technical analysis in this study uses qualitative normative analysis techniques.

The results showed that law the Regional Government has the authority to issue municipal bonds and, in principle, the Regional Government is possible to issue municipal bonds with the examination of financial statements by the Board of Audit and Oversight through the capital markets sector are carried out by the Service Authority Finance and also must get approval from the Central Government. For the Government of West Java province needs a strategic step in order Issuance of Municipal Bonds can be realized and the need to create policies that support teralisasiinya Municipal Bond Issuance

Keywords: *Municipal Bonds, Authority, Regional Government.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	v
PERSETUJUAN REVISI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9

D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II PENYELENGGARAAN OTONOMI SEBAGAI

PEMENUHUAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	20
A. Konsep Negara Kesejahteraan.....	20
B. Konsep Otonomi Daerah.....	25
1. Pengertian dan Prinsip Otonomi Daerah	25
2. Tujuan Otonomi Daerah di Indonesia.....	28
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia	30
C. Kewenangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah....	36
1. Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	36
2. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah	36
D. Keuangan Daerah	48

1. Pengertian keuangan daerah	48
2. Kemandirian keuangan daerah.....	51
3. Hubungan antara Keuangan Daerah dan Keuangan Negara.....	53

BAB III OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN

KERANGKA OTONOMI DAERAH	57
A. Alternatif Sumber Pembiayaan Dalam Pembangunan Daerah.....	57
1. Pajak Daerah.....	57
2. Retribusi Daerah.....	60
3. Bantuan Luar Negeri dan Hibah	62
4. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	64
5. Badan Usaha Milik Daerah.....	66
B. Obligasi Daerah.....	68
1. Pengertian Obligasi Daerah	68
2. Pengaturan Obligasi Daerah	70
3. Jenis-Jenis Obligasi Daerah.....	74
4. Tujuan Obligasi Daerah.....	77

C. Pengawasan Penerbitan Obligasi Daerah.....	81
1. Penerbitan Obligasi Daerah	81
2. Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	86
3. Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	89
D. Peran Pasar Modal Penerbitan Obligasi Daerah.....	91
1. Definisi Pasar Modal	91
2. Instrumen Pasar Modal	93
3. Peran Pasar Modal	95
BAB IV KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN DAN	
PENGAWASAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DI	
PROVINSI JAWA BARAT	98
A. Kewenangan Pemerintahan Daerah Jawa Barat terkait Penerbitan Obligasi Daerah Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	98
B. Pengawasan Penerbitan Obligasi Terhadap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Pasca Diberlakukannya Undang-Undang	

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah <i>Juncto</i>	
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan	
Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	136
CURRICULUM VITAE.....	140
MATRIKS REVISI.....	142
LAMPIRAN : Dokumen Hasil Wawancara	